



PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph>

KILAS BALIK KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DAN INPRES PADA MASA ORDE BARU

Celynta Salonica Nababan¹, Latika Delvi², Yessi Nanda Pratiwi³
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,
Indonesia¹²³

ncelynta@gmail.com¹, latikadelfi@gmail.com², yessinandaprtwii@gmail.com³

Accepted: 10 Agustus 2023

Published: 29 Agustus 2023

Abstract

This research discusses one of President Soeharto's educational policies in the field of education, namely the compulsory education program. This compulsory education program ultimately sparked Suharto's idea of building elementary schools and repairing damaged school buildings which were then called Presidential Instruction Elementary Schools (SD Inpres). The aim of this research is to examine what problems occur in the Compulsory Education policy and the construction of SD Inpres. The method used in this research is the historical method which includes heuristics, verification, interpretation and historiography. The research results show that the compulsory education program in the era of President Soeharto has not fully achieved the expected goals. This is because many people are not aware of the importance of education, there is misappropriation of funds by certain parties, the educational gap that occurs in society is still very visible, and the development carried out is only aimed at political interests. The construction of SD Inpres only prioritizes quantity without paying attention to quality developments. At this time, the most important thing is to create as many educated graduates as possible without looking at the quality of teaching and educational outcomes.

Key words: *New Order, Presidential Elementary School, Compulsory Education*

How to Cite: Nababan. C. S., Delvi. L., Pratiwi. Y. N. (2023) Kilas Balik Kebijakan Wajib Belajar dan Inpres Pada Masa Orde Baru. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* (368-372)

*Corresponding author:
ncelynta@gmail.com

ISSN 2460-5786(Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

INTRODUCTION

Orde baru merupakan pergantian periodisasi politik yang dimulai sejak dikeluarkannya Supersemar yang ditulis oleh Soekarno pada 11 Maret 1966. Isi dari Supersemar tersebut ialah Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jendral Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengamankan kestabilan negara. Istilah orde baru diciptakan untuk membedakan pemerintahan Orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno dengan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Perbedaan nama periode bukan hanya sejarah harfiah saja, namun juga berimplementasi pada kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan utamanya dalam pendidikan.

Menurut Suparno dkk dalam jurnal Implementasi kebijakan pendidikan era Soeharto pada eksistensi Madrasah, sentralisasi pendidikan adalah proses pendidikan di mana semua hal ini mencakup pelaksanaan aspek pendidikan diatur dari pusat. Kurikulum, guru, seragam sekolah, waktu belajar, pelaksanaan, tujuan, semuanya diatur oleh pusat (Suharto, 2012). Pemerintah memandang bahwa pendidikan merupakan suatu upaya yang mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan begitu pemerintah mendirikan sekolah disetiap jenjang pendidikan dan juga mengembangkan kurikulum pendidikan.

Kebijakan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru salah satunya adalah dalam bidang Pendidikan. Pendidikan salah satu garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan salah satu pemikiran Presiden Soeharto, Pendidikan Nasional ini menyangkut masalah hubungan antara Pembangunan Nasional dengan Pendidikan Nasional dan melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (REPLITA). Dari pemikiran Soeharto tersebut teretuslah untuk membangun Sekolah-sekolah Dasar dan memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak dan pada masa itu yang disebut sebagai Sekolah Dasar Instruksi Presiden atau (SD Inpres). SD Inpres ini merupakan salah satu kebijakan yang dibuat untuk mewujudkan program Wajib Belajar.

Program wajib belajar tersebut yaitu mewajibkan setiap anak berusia 8 tahun memperoleh pendidikan dasar. Dampak dari

kebijakan SD Inpres dan wajib belajar cenderung mengalami peningkatan tetapi juga didalamnya juga terjadi permasalahan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji permasalahan yang terjadi didalam kebijakan Wajib Belajar dan SD Inpres.

METHODOLOGY

Metode merupakan sebuah prosedur, atau ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses, atau tehnik yang sistematis dalam penyidikan disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Sjamsuddin, 2007). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode sejarah. Metode sejarah (historical method) adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya atau dengan kata lain metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (historical as pass actuality) menjadi sejarah sebagai kisah (history as written) (Gottschalk, 1975). Untuk memperoleh data, penulis melakukan langkah-langkah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Pertama, heuristik merupakan langkah awal dalam metode sejarah berupa aktivitas mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber sebanyak mungkin untuk dijadikan bahan memasuki tahap selanjutnya dalam penelitian sejarah (Joko, 2021). Pada tahapan ini peneliti mendatangi perpustakaan Universitas Negeri Medan untuk mendapatkan sumber-sumber bacaan seperti buku maupun jurnal dalam jumlah yang cukup banyak untuk memperoleh data.

Kedua adalah verifikasi atau kritik sumber, merupakan tahap penyaringan data yang sudah terkumpul agar mampu terklasifikasi data yang asli dan relevan dengan fokus penelitian. Pada tahapan ini peneliti mengubah sumber data ke dalam fakta. Dalam menganalisis sebuah data, penulis menggunakan 2 tahap kritik sumber yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Pada kritik ekstern, peneliti menguji keaslian sebuah data yang telah didapat dari buku dan juga jurnal. Sedangkan pada kritik intern, peneliti menentukan kredibilitas dari sebuah data yang telah diperoleh. Pada tahapan ini peneliti memilih dan memisahkan data mana yang benar dan mana yang salah setelah data-data terkumpulkan secara menyeluruh.

Ketiga adalah interpretasi, merupakan

sebuah tahap pemberian makna dan arti pada fakta yang masih mentah. Pada tahap ini, peneliti mulai menggabungkan data-data yang telah teruji kebenarannya kemudian menggabungkannya menjadi sebuah kalimat yang utuh.

Keempat, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dalam hal ini teknik historiografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni menulis sejarah dengan fakta-fakta yang tersusun.

RESULT AND DISCUSSION

1. Wajib Belajar

Rezim orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Melalui proses yang cukup panjang, pemerintah orde baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan Nasional pasca peristiwa 1965. Sejak Orde Baru berkuasa, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto berusaha menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi lebih baik. Usaha-usaha tersebut didasarkan pada tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Soeharto berdirinya Orde Baru tidak ada alasan lain kecuali untuk membangun kembali struktur kehidupan rakyat, bangsa dan negara (Hadi Wahyono Dwi & Kasuma Gayung, 2012).

“Orde Pembangunan” adalah slogan orde baru yang tujuannya adalah untuk mencitrakan cita-cita luhur yang baru. Slogan tersebut diharapkan mampu membangkitkan dukungan rakyat kepada orde baru untuk melakukan pembangunan yang diusung oleh Repelita (Rahmawati, 2022).

Salah satu program kebijakan pada masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto adalah dalam bidang Pendidikan. Pendidikan pada masa Orde Baru dinilai hanya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan orde baru (Soeharto) melalui polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi dan regulasi yang tidak memihak pada rakyat tetapi telah dipola dibentuk untuk mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan (Loppies, 2023). Dalam hal ini pendidikan merupakan salah satu kebijakan politik untuk menyekong

pembangunan nasional Orde Baru. Semua pelaksanaan pendidikan ditentukan oleh pusat.

Sistem pendidikan pada masa Orde Baru ini menggunakan dua jalur dalam melaksanakannya yaitu pendidikan umum dan khusus. Pendidikan umum yaitu pendidikan formal seperti Sekolah Dasar, SMP dan SMA dan Universitas atau pendidikan tinggi. Sedangkan pada pendidikan khusus adalah pendidikan kejuruan yang dibuat untuk mempersiapkan anak-anak untuk memasuki lapangan kerja.

Salah satu kebijakan dari Repelita dalam bidang pendidikan yaitu wajib belajar dan inpres. Wajib belajar adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, tepatnya tanggal 2 Mei 1984. Program wajib belajar ini adalah satu dari beberapa upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan di Indonesia, tekhusus pada pendidikan tingkat Sekolah Dasar. Dalam hal ini orang tua yang memiliki anak pada usia 7-12 mendapatkan hak dan kewajiban untuk membawa anak mereka masuk Sekolah Dasar. Fokus yang paling utama dalam kebijakan pendidikan saat itu adalah untuk mengurangi buta huruf pada anak usia 7-12 tahun.

Menurut Santoso Sastroperto terdapat beberapa factor yang melatarbelakangi dikeluarkannya program wajib belajar, diantaranya yaitu geografis, perekonomian keluarga, tradisi masyarakat, serta sarana dan fasilitas pendidikan (Wati, 2017). Tujuan dari pelaksanaan wajib belajar ini agar anak tamat Sekolah Dasar. Karena dengan program inilah dapat mencapai salah satu tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dari kebijakan wajib belajar itu angka buta huruf di Indonesia turun drastis. Orang tua mulai memperhatikan pendidikan anak mereka. Mereka banyak yang sadar akan investasi pendidikan dalam jangka panjang. Selain itu, banyak di bangun sarana dan prasana sekolah untuk menunjang dari kebijakan wajib belajar ini.

Dalam pelaksanaannya, program wajib belajar ini mengalami tantangan dan permasalahan diantaranya (Sari & Khoiri, 2023):

1. Pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah kurang berdampak bagi masyarakat lemah, karena bantuan diberikan kepada Lembaga pendidikan bukan kepada individu. Pemberian bantuan ini lebih mengarah ke daerah-daerah pusat

sehingga timbul perpindahan masyarakat ke kota karena mengejar mutu pendidikan yang layak. Kebijakan pendidikan seharusnya memperhatikan daerah sebaran dan pertumbuhan penduduk, bukan hanya memikirkan kuliatas penduduk saja.

2. Bantuan Operasional Sekolah menjadi diskrimasi bagi anak-anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan dan tidak menjangkau mereka yang tidak bersekolah. Hal ini menimbulkan prasangka bahwa anak yang tidak bersekolah tidak dibantu, namun mereka yang bersekolah malah mendapat bantuan padahal mereka mampu untuk mengenyam pendidikan.
3. Sekolah-sekolah menuntut calon peserta didik untuk melakukan pendaftaran. Mereka seharusnya merangkul calon peserta didik dengan pendekatan aspiratif dan geologis untuk bergabung dalam lembaga pendidikan sehingga orang tua cenderung memilih menyuruh anaknya untuk bekerja dari pada menyuruh mereka ke sekolah.
4. Upaya pemerintah yang gagal dalam menjangkau daerah-daerah kurang mampu di tingkat sekolah menengah pertama yang berujung gagal karena lemahnya semangat kemitraan dan kuatnya “berorientasi proyek” pemerintahan daerah yang mengakibatkan pada penutupan MTS da SMP swasta. Karena hal ini semakin sedikit peluang untuk kolaborasi dan pemeriksaan etos kemandirian masyarakat rusak.
5. Akibat dari upaya penguatan lembaga pendidikan, tingkat persaingan untuk bersekolah semakin berat bagi mereka yang secara struktural, geografis, sosial budaya, dan ekonomi tertinggal.
6. Jalur pendidikan nonformal termasuk pendidikan kesetaraan seperti kelompok belajar (Kejar), program paket A, B dan C yang melaksanakan KMB melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sangat berperan dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun sebagai upaya untuk perbaikan pendidikan. Namun terjadi kesenjangan dimana guru dan peserta didik tidak terlibat dalam proses KBM sebagaimana yang telah ditentukan. Ditemukan kasus-kasus kegiatan belajar yang sifatnya fiktif, sehingga pengurus PKBM sering kesulitan untuk menunjukkan

lokasi dan kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung pada saat dilakukan pengecekan oleh kantor cabang dinas. Selain itu juga ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rancangan yang sudah disetujui Dinas Pendidikan. Sehingga PKBM ini bisa dikatakan menjadi tempat untuk jual beli ijazah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program wajib belajar belum sepenuhnya berhasil. Keberhasilan dari program wajib belajar ini cenderung di daerah perkotaan saja. Masih banyak juga masyarakat yang belum begitu sadar akan pentingnya pendidikan. Dana dari wajib belajar juga masih di korupsi oleh pihak-pihak tertentu. Kesenjangan pendidikan pun masih terlihat antara si kaya dan si miskin.

2. Inpres (Instruksi Presiden)

Selanjutnya kebijakan dalam bidang pendidikan pada Masa Orde Baru adalah Sekolah Inpres yaitu tentang pembangunan Gedung Sekolah Dasar (SD). Kebijakan ini tidak lain halnya bertujuan untuk pembangunan yang akan berdampak pada politik pada masa itu. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran Soeharto kemudian tercetuslah membangun Sekolah-sekolah Dasar dan memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak. Pada saat itu disebut Sekolah Dasar Instruksi Presiden. Ketentuan Inpres ini telah tercantum, dalam Instruksi Presiden No.10 Tahun 1973 tentang Program Pembangunan Gedung SD.

Sekolah Inpres merupakan salah satu kebijakan unggulan di bidang Pendidikan pada masa Pemerintahan Soeharto dengan dikeluarkannya Inpres Pembangunan Gedung Sekolah Dasar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Putra et al., 2021). Pelaksanaan pembangunan SD Inpres ternyata tidak berjalan dengan lancar. Banyaknya pembangunan SD Inpres diseluruh Indonesia mengakibatkan kebutuhan guru semakin bertambah.

Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan Dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat besar yaitu dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pendidikan Dasar. Namun, yang sangat disayangkan dalam pelaksanaan Inpres ini adalah keberlangsungan hanya dari kuantitas tanpa diikuti dengan perkembangan kualitas. Pada masa ini yang terpenting adalah

menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa melihat kualitas pengajaran dan hasil didikan.

Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan pendidikan dalam suatu sekolah. Tanpa seorang guru, gedung-gedung SD yang telah dibangun tidak akan ada gunanya. Oleh sebab itu, pengadaan dan penempatan guru menjadi kunci penting dalam SD Inpres (Oktavia, 2018).

Pada masa Orde Baru, kesetaraan dalam pendidikan tidak dapat diciptakan karena unsur dormatif dan submisif masih sangat kental. Pada masa Orde baru para peserta didik diberikan materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan. Dengan demikian, pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah (Ahmad Kamaludin, 2017). Dalam hal ini doktrin yang ada pada masa Soeharto sudah ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Pada masa Orde Baru pendidikan diarahkan bukan untuk kepentingan rakyat namun untuk tuntutan kehidupan pada masa suasana perang sehingga semua serba kaku dan berjalan dalam system yang otoriter, baik pada peserta didik maupun pada tenaga pendidik yang terjadi ketika diberlangsungkannya kebijakan Inpres.

CONCLUSION

Adanya kebijakan wajib belajar yang dibuat oleh Presiden Soeharto mengakibatkan angka buta huruf di Indonesia turun drastis, orang tua mulai memperhatikan pendidikan anak mereka. Selain itu, banyak di bangun sarana dan prasana sekolah untuk menunjang dari kebijakan wajib belajar ini. Namun, masih ada permasalahan yang terjadi dalam kebijakan wajib belajar ini sehingga dapat dikatakan bahwa program wajib belajar belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Contoh dari permasalahan tersebut adalah masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan, terjadi penyelewengan dana (korupsi) oleh pihak tertentu, kesenjangan pendidikan yang terjadi di masyarakat masih sangat terlihat,

serta pembangunan yang dilakukan hanya bertujuan untuk kepentingan pihak politik saja.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap adanya kesadaran diantara kita semua tentang pendidikan, kejujuran, dan tanggung jawab, guna untuk membangun negara kita menjadi negara yang lebih maju lagi.

REFERENCE LIST

- Ahmad Kamaludin. (2017). H.M. Rachmatoellah Siddik Dan Pendidikan Masa Orde Baru (Tokoh Pendidikan Di Banten). *Jurnal Agama Dan Budaya*, 15(1), 80-90.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah :Pengantar Metode Sejarah*. Universitas Indonesia.
- Hadi Wahyono Dwi, & Kasuma Gayung. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Verleden*, 1(1), 1-109.
- Loppies, M. (2023). PENDIDIKAN ZAMAN ORDE BARU: UPAYA MELANGGEMKAN KEKUASAAN SOEHARTO. *Phinisi Integration Review*, 6(2), 237-245.
- Oktavia, R. A. (2018). Dinamika SD Inpres Di Kabupaten Bantul Tahun 1973-1983. *Jurnal Ilmu Sejarah*, 3, 789-803.
- Putra, R. E., Fatimah, S., Sejarah, J., Ilmu, F., Universitas, S., & Padang, N. (2021). Nasib Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung pada Masa Transisi Orde Baru. *Kronologi*, 3(1), 79-87.
- Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesenjangan*, IX(2), 36-42.
- Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, 5(3), 9441-9450. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757>
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Ombak.
- Suharto, T. (2012). *Implementasi kebijakan pendidikan era Soeharto pada eksistensi Madrasah*. 27.
- Wati, N. L. (2017). Program Wajib Belajar Di Surabaya Tahun 1984-1985 Dalam Pemberitaan Media Massa Cetak. *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 463-474.